

## ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Sapriila Nur Fadila<sup>1</sup>, Gideon Setyo Budiwitjaksono<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur, Indonesia

e-mail: [saprilanurfadila32@gmail.com](mailto:saprilanurfadila32@gmail.com) , [gideon.ak@upnjatim.ac.id](mailto:gideon.ak@upnjatim.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Seluruh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan di Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 responden yang dipilih menggunakan metode probabilitas dengan teknik *simple random sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan alat bantu aplikasi *software* SPSS versi 26 *for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan, pengendalian akuntansi dan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

**Kata kunci:** Akuntabilitas Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Akuntansi

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of budget goal clarity, accounting control, reporting systems, and human resource quality on accountability of Sidoarjo Local Government performance. All of the Head OPD, Secretaries, Head of Sub Division of Planning and Finance, as well as Staff of Planning and Finance Division in Sidoarjo Local Government Office was selected as population in this study. The sample of this study is 64 respondents selected using probability method with simple random sampling technique. Data analysis in this study used multiple regression analysis methods with SPSS version 26 for windows software application. The result of this study showed that budget goal clarity and reporting system had a significant effect on accountability of Sidoarjo Local Government performance, while the accounting control and human resource quality had no significant effect on accountability of Sidoarjo Local Government performance.*

**Keywords :** *Accounting Control, Accountability Performance, Budget Goal Clarity, Human Resource Quality, Reporting Systems*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, tuntutan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel semakin meningkat. Pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat harus menganggapi hal ini dengan tegas dan serius. Setiap elemen dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki komitmen yang kuat dan saling bekerja sama untuk dapat mewujudkan suatu akuntabilitas yang baik.

Menurut Widyatama et al., (2017) akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur pemerintah atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Dengan adanya suatu akuntabilitas diyakini dapat mengubah kondisi pemerintahan yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik, mencegah adanya korupsi, dan meminimalisir adanya penyelewengan kekuasaan.

Adanya Peraturan Perundang-Undangan berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien. Dalam rangka menjamin suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dapat menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, mensejahterakan rakyat, serta memperbaiki tata kelola pemerintahannya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 4 (empat) tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2018 memperoleh nilai SAKIP yang terus meningkat. Namun, ditahun 2019 terdapat penurunan nilai SAKIP sebesar 2,74 dibandingkan dengan perolehan nilai SAKIP pada tahun 2018

Pada tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo berhasil mendapatkan predikat A dengan perolehan nilai SAKIP sebesar 80,4. Namun, setelah mendapatkan predikat A di tahun 2018, ternyata Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mempertahankan predikat tersebut ditahun 2019 dikarenakan telah terjadi penurunan nilai SAKIP dengan nilai sebesar 77,3 atau mendapatkan predikat BB. Hal ini menandakan bahwa masih belum optimalnya kinerja instansi pemerintah dan terdapat suatu permasalahan sehingga mengakibatkan adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah sebagai *agent of change* diharuskan untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kualitas sumber daya manusia.

Anggaran merupakan alat yang digunakan dalam proses perencanaan terkait dengan kegiatan yang dilakukan di masa mendatang untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparatur pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga dapat memprediksi masa depan secara cepat. Aparatur pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menyusun target-targetnya ketika sasaran anggaran tidak jelas. Selain itu, ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti (Fauzan, 2017). Anggaran yang telah disusun seharusnya bisa menjadi tolak ukur dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga suatu perencanaan anggaran dapat mencerminkan sasaran anggaran yang jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Handayani (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya sehingga berimplikasi pada akuntabilitas kinerja yang semakin meningkat. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Sukamto (2019) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan program-program dan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah akan sesuai dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya ketika terdapat suatu sistem pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi akan membantu pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan suatu kinerja (Fathia et al., 2017). Pengendalian akuntansi yang tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan terjadinya suatu penyimpangan oleh orang-orang yang terdapat dalam instansi pemerintah dan berakibat pada tingkat akuntabilitas yang menurun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Sukamto (2019) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi yang baik dapat menciptakan pelaksanaan kinerja keuangan yang baik pula dimana hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Sapari (2020) menyatakan hasil yang berbeda, yaitu pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah terkait dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dikontrol dengan adanya suatu sistem pelaporan yang baik. Sistem pelaporan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah selama periode tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi agar dapat melaksanakan tanggungjawab lebih baik lagi untuk kedepannya. Sistem pelaporan yang tidak baik dapat menyesatkan para pengguna laporan sehingga mengakibatkan suatu pengambilan keputusan yang salah. Sistem pelaporan dapat dikatakan baik jika laporan telah disusun secara jujur, objektif dan transparan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik (Kartika & Sukamto, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Sukamto (2019) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan memudahkan para penggunanya untuk memahami informasi yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan suatu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Precelina dan Wuryani (2019) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena setiap organisasi mempunyai manajemen yang ingin menang sendiri sehingga manajemen puncak terkait harus mengontrol secara langsung untuk menciptakan teknik yang baik serta meningkatkan loyalitas bagi manajemen bawah terhadap SKPD tersebut.

Suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat ketika terdapat kualitas sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam suatu instansi pemerintah karena diyakini dapat membuat suatu perubahan yang mengarahkan organisasi kepada suatu pencapaian tujuan tertentu. Adanya kualitas sumber daya yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula ditandai dengan tercapainya target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu tujuan dalam instansi pemerintah dapat tidak tercapai dan menimbulkan hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik ketika instansi

tersebut memiliki kualitas sumber daya yang rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam suatu organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan agar menghasilkan kinerja sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rodhiyah & Sapari (2019) menyatakan hasil yang berbeda, yaitu kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Madiun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; (2) Untuk menguji pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; (3) Untuk menguji pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan (4) Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory* dan *goal-setting theory*. *Agency Theory* atau yang dikenal sebagai teori keagenan adalah teori yang membahas mengenai keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan kepada agen tersebut selaku pengelola organisasi (Jensen & Meckling, 1976). *Agency theory* menganggap bahwa pemerintah daerah sebagai agen bertindak dengan penuh kesadaran untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri sedangkan masyarakat sebagai prinsipal menganggap bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya

untuk dapat bertindak sebaik mungkin demi memenuhi kepentingan masyarakat.

Hubungan antara *agency theory* dengan penelitian ini adalah pemerintah daerah sebagai pengelola pemerintahan (agen) harus menetapkan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat selaku prinsipal. Pemerintah daerah selaku agen harus memiliki kinerja yang baik untuk dapat meningkatkan kepercayaan dari prinsipal (masyarakat). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi kepada masyarakat secara detail dan transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja yang dimiliki oleh pemerintah dan dapat mengevaluasi setiap tugas yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah.

*Goal-Setting Theory* atau yang juga dikenal sebagai teori penetapan tujuan merupakan salah satu dari bentuk teori motivasi. Pada awalnya teori ini dikemukakan oleh Locke (1968) yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang terhadap tugas. *Goal-Setting Theory* mengasumsikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi seorang individu dalam menentukan suatu pilihan adalah tujuan yang telah mereka miliki. Seorang individu akan memiliki sebuah komitmen yang besar dalam mencapai suatu tujuan ketika mereka mengetahui dan memahami dengan benar tujuan yang harus mereka capai. Penetapan suatu tujuan dengan pemahaman yang baik membuat kinerja individu semakin meningkat yang nantinya juga berimplikasi pada peningkatan kinerja suatu organisasi.

Hubungan *Goal-Setting Theory* dengan penelitian ini yaitu aparatur pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola keuangan publik pasti akan memiliki target atau tujuan yang harus dicapai untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Aparatur pemerintah yang mengetahui dan memahami target atau tujuannya dengan benar pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki. Ketika suatu permasalahan terjadi

mereka akan berusaha untuk mengevaluasi dan mengatasinya dengan sebaik mungkin sehingga dapat tercipta suatu kinerja yang baik.

Menurut Ayuni & Erawati (2018), anggaran memiliki suatu karakteristik yaitu adanya kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran terkait dengan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas sehingga anggaran tersebut dapat mudah dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran dalam suatu organisasi. Kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting dalam membantu aparatur pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang cukup dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran anggaran yang tidak jelas atau membingungkan akan mengakibatkan ketidakpastian kepada para pelaksananya sehingga berimplikasi pada menurunnya suatu kinerja yang berarti juga menurunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan membuat para pelaksana anggaran lebih mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pitaloka dan Handayani (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparatur pemerintah dalam mengontrol setiap pos anggaran yang telah ditentukan sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang terhadap suatu anggaran. Selain itu, diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Precelina dan Wuryani (2019) bahwa kejelasan sasaran anggaran membuat para pegawai berkomitmen penuh untuk mencapai sasaran atau tujuannya, sehingga suatu akuntabilitas kinerja yang baik dapat tercapai.

**H<sub>1</sub>: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengendalian akuntansi merupakan suatu proses penetapan standar untuk membuat tujuan suatu instansi pemerintah menjadi terarah dan tercapai yang tercermin dari laporan keuangan yang andal, program-program yang berjalan secara efektif dan efisien, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian akuntansi menjadi suatu pedoman dalam menjalankan suatu pemrosesan data-data akuntansi dalam rangka untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan atau tindakan penyimpangan (Precelina & Wuryani, 2019).

Pitaloka dan Handayani (2019) menyatakan bahwa adanya pengendalian akuntansi dalam suatu instansi tidak menghilangkan peluang terjadinya tindakan kecurangan, namun dapat menekan resiko terjadinya kesalahan sehingga dapat segera diketahui dan diatasi dengan cepat untuk meminimalisir banyaknya kerugian yang dialami oleh instansi tersebut. Suatu pengendalian akuntansi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap berbagai macam aktivitas yang ada diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam memberikan sebuah informasi dan pengungkapan atas aktivitas yang dilakukan kepada masyarakat sehingga dapat tercipta suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

Pratama et al., (2019) dan Fathia et al., (2017) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa pengendalian akuntansi dapat membantu aparatur pemerintah untuk mengontrol setiap kegiatan operasional agar lebih efektif, membuat keputusan-keputusan secara tepat, dan memilih alternatif terbaik dalam setiap permasalahan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**H<sub>2</sub>: Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem pelaporan merupakan suatu sistem yang menjadi pertanggungjawaban bawahan kepada atasan atas segala aktivitas yang telah dilakukan dalam suatu

periode tertentu untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan ini nantinya akan memberikan gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan kinerja suatu instansi pemerintah daerah. Sistem pelaporan memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat ketidakpastian atas suatu masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan dan memunculkan tindakan yang tepat dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi (Pitaloka & Handayani, 2019).

Pratama et al., (2019) menyatakan bahwa pelaporan merupakan wujud atas proses akuntabilitas dimana pemerintah harus melaporkan kinerja secara menyeluruh dan detail. Hal tersebut menandakan bahwa sistem pelaporan yang baik akan menghasilkan suatu data yang detail sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat. Sistem pelaporan yang baik juga dapat membantu pemerintah untuk mengontrol kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan dan diyakini dapat memberikan informasi dengan nilai manfaat yang tinggi bagi para penggunanya dalam mengambil suatu keputusan (Kartika & Sukamto, 2019). Selain itu, diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Isnanto et al., (2019) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan diperlukan untuk mengukur berbagai macam aktivitas yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja sehingga dapat diketahui adanya suatu evaluasi atas pelaksanaan anggaran dalam suatu periode tertentu.

### **H<sub>3</sub>: Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Apriyani (2019), sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas ketika seseorang mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. Setiap organisasi pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan akunta-

bilitas kinerja instansi pemerintah. Individu yang ada dalam organisasi harus mampu bekerja dengan totalitas, mempunyai semangat yang tinggi dan inovasi cemerlang dalam memberikan kontribusi kepada organisasi sehingga dapat mencapai suatu kinerja yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sumber daya manusia yang berkualitas berperan penting dalam organisasi sektor publik dalam rangka menghasilkan kinerja yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebelumnya sehingga dapat terwujud suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Selain itu, diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Azizah (2020) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi sektor publik sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas kerja yang nantinya menjadi penentu atas keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan kontribusinya secara maksimal sehingga menghasilkan kinerja yang baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **H<sub>4</sub>: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada para responden dengan survei langsung atau menggunakan fitur *google form*. Kuesioner yang telah dibuat akan disebar ke Seluruh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan di Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala likert atau metode skor.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Seluruh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam 19 Dinas Daerah di Kabupaten Sidoarjo sehingga secara keseluruhan populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 76 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Penentuan sampel menggunakan rumus slovin yang dirumuskan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah Sampel = 64

N= Jumlah Populasi = 76

e = Batas Toleransi Kesalahan = 0,05

Berdasarkan hasil rumus diatas, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 64 responden.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, (2) uji normalitas, (3) uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, (3) Uji hipotesis meliputi uji koefisien determinasi, uji simultan (uji f), uji parsial (uji t) dan analisis regresi linear berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data

primer berupa kuesioner yang disebarakan secara langsung oleh peneliti kepada responden sebanyak 64 kuesioner dengan tingkat pengembalian 100%.

Data yang diperoleh kemudian diuji menggunakan uji kualitas data. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi *product moment* yang dikemukakan oleh Karl Pearson. Suatu instrumen dikatakan valid ketika nilai signifikansi dari skor butir instrumen < 0,05. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kualitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai signifikansi < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal ketika memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Berdasarkan pengelolaan data yang telah dilakukan seluruh variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner dari variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi data normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

	Unstandardized Residual
N	64
Test Statistic	.095
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah, 2021

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Suatu data dapat dikatakan memiliki distribusi normal ketika nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* > 0,05. Dari hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak, cukup melihat pada kolom nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*). Perolehan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa uji normalitas yang dilakukan oleh peneliti memiliki nilai signifikansi 0,200 yang artinya data terdistribusi normal atau > 0,05.

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau

tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen menandakan bahwa model regresi tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF. *Tolerance* yang memiliki nilai > 0,1 dan VIF yang memiliki nilai < 10 menunjukkan tidak terjadinya gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kejelasan Sasaran Anggaran	.493	2.028
Pengendalian Akuntansi	.473	2.115
Sistem Pelaporan	.507	1.973
Kualitas Sumber Daya Manusia	.635	1.575

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kualitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai *Tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen dalam model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dikatakan baik ketika tidak terjadi

heteroskedastisitas. Model persamaan regresi yang menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas memiliki uji glester dengan nilai signifikansi > 0,05.

Berdasarkan pada Tabel 3, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kualitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai signifikansi > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.035
Kejelasan Sasaran Anggaran	.422
Pengendalian Akuntansi	.089
Sistem Pelaporan	.543
Kualitas Sumber Daya Manusia	.621

Sumber : Data diolah, 2021

Selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui dengan menggunakan

analisis konstanta serta koefisien beta. Pada Tabel 4 dapat diketahui hasil perhitungan konstanta dan koefisien beta serta hasil uji t.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients			
		B	Std. Error	t	Sig.
1	(Constant)	-1.514	5.285	-.287	.775
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.629	.156	4.030	.000
	Pengendalian Akuntansi	.108	.138	.781	.438
	Sistem Pelaporan	.440	.195	2.260	.028
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.130	.109	1.193	.238

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas, model regresi linear berganda yang diperoleh:  $Y = -1,514 + 0,629X_1 + 0,108X_2 + 0,440X_3 + 0,130X_4 + 5,285$ . Jika variabel kejelasan sasaran anggaran naik sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan naik sebesar 0,629 satuan. Variabel pengendalian akuntansi yang mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,108 satuan. Apabila variabel sistem pelaporan naik sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan naik sebesar 0,440 satuan sedangkan ketika variabel kualitas sumber daya manusia naik 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan naik sebesar 0,130 satuan, masing-masing dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Setelah dilakukan analisis regresi berganda dilanjutkan dengan uji parsial (uji t). Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4, dapat ditarik kesimpulan hasil hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: (1)

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. (2) Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi  $0,438 > 0,05$ , sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. (3) Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi  $0,028 < 0,05$ , sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. (4) Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi  $0,238 > 0,05$ , sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) dalam penelitian ini ditolak.

Kemudian data diolah dengan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 <sup>a</sup>	.619	.593	3.287

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 5 diperoleh nilai R Square sebesar 0,619 yang memiliki arti bahwa terdapat pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kualitas sumber daya manusia sebesar 61,9% dan 38,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

Selanjutnya yaitu uji simultan (uji f). Uji simultan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel dependen dan beberapa variabel independen secara simultan. Berikut hasil dari uji simultan (uji f):

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.
1 Regression	23.981	.000 <sup>b</sup>

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh F-hitung sebesar 23,981 yang lebih besar jika dibandingkan dengan F-tabel sebesar 2,528 dan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kabupaten Sidoarjo telah memiliki perencanaan anggaran yang jelas dan spesifik sehingga para pelaksana anggaran dapat memahami dengan baik target yang nantinya harus dicapai. Adanya kejelasan perencanaan anggaran akan mempermudah pelaksana anggaran dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas setiap program yang telah dilaksanakan.

Kejelasan sasaran anggaran sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terkait dengan fungsi pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, para pelaksana anggaran yang mengetahui dengan baik sasaran anggaran yang ingin dicapai mendorong mereka untuk semakin totalitas dalam bekerja dan menggunakan

wewenangnya dengan baik dalam mengelola suatu anggaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik dan jelas suatu perencanaan anggaran maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan yang dimana hal tersebut juga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Azizah, 2020; Precelina & Wuryani, 2019). Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2019) dan Aprilianti et al., (2020) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa instansi di Kabupaten Sidoarjo belum melakukan pemisahan antara tanggungjawab operasional dan tanggungjawab pencatatan dengan baik serta masih ada suatu transaksi yang dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang. Tujuan suatu pengendalian akuntansi akan tercapai ketika sistem yang digunakan memenuhi enam prinsip dasar, yaitu adanya pemisahan fungsi,

prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, pengawasan fisik, dan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi (Precelina & Wuryani, 2019). Berdasarkan enam prinsip dasar untuk mencapai suatu pengendalian akuntansi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya melakukan pemisahan fungsi dan prosedur pemberian wewenang dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa masih ada kelemahan pengendalian akuntansi dalam Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Nasution & Sapari, 2020). Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana et al., (2018) dan Yulianto & Muthaher (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sistem pelaporan yang baik menandakan bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan menyajikan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, mudah dipahami oleh para pengguna dan memperhatikan ketepatan waktu dalam setiap pembuatan laporannya. Adanya sistem pelaporan dapat meminimalisir terjadinya suatu kecurangan sehingga dapat mewujudkan suatu akuntabilitas kinerja yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baik suatu sistem pelaporan maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdillah et al., (2019) dan Dewata et

al., (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rininda & Sudaryati (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikarenakan beberapa responden dalam instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki latar belakang non-ekonomi dan tidak semua responden pernah mengikuti pelatihan maupun seminar terkait dengan akuntansi pemerintah. Adanya aparatur pemerintah yang memiliki latar belakang non-ekonomi dan tidak linear dengan bidang pekerjaannya tidak menjadi penghalang untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Kesungguhan dalam mengasah pengetahuan dan kemampuan dapat membuat seseorang meraih keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat mewujudkan suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rodhiyah & Sapari (2019) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rere (2018) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah pelaksana anggaran dalam memahami setiap target yang hendak dicapai dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas setiap program yang telah dilaksanakan; (2) Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena belum dilaksanakannya enam prinsip dasar pengendalian akuntansi secara menyeluruh; (3) Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena adanya sistem pelaporan yang baik menandakan pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kecurangan; dan (4) Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena latar belakang non-ekonomi yang tidak linear dengan bidang pekerjaan seseorang tidak menjadi hambatan untuk dapat menghasilkan suatu kinerja yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hendaknya memperhatikan pengendalian akuntansi dan kualitas sumber daya manusia sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat tercapai suatu akuntabilitas kinerja yang sangat memuaskan atau mendapatkan predikat "AA" dengan skor 90-100 dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat menambah ruang lingkup penelitian tidak hanya pada Dinas namun di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

#### DAFTAR PUSTAKA

Apriyani, A. (2019). *Pengaruh Audit Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan di Departement Laboratory Pada PT X* [Universitas Muhammadiyah

Sukabumi].

<http://eprints.ummi.ac.id/id/eprint/877>

- Ayuni, N. M. K., & Erawati, N. M. A. (2018). Pengaruh Asimetri Informasi Pada Senjangan Anggaran dengan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(1), 492–520. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i01.p19>
- Azizah, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Fathia, N., Yusraini, P. :, & Anggraini, L. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Pro. JOM Fekon, 4(1), 670–685.
- Fauzan, R. H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provin. *JOMFekom*, 4(1), 1122–1136. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. In (*Edisi 9*). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isnanto, Y., Suharno, S., & Widarno, B. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah. *JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI*, 15, 489–501. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/3733>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kartika, R. D., & Sukanto, S. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya). In *Liability*.
- Locke, E. A. (1968). Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. *Organizational Behavior and Human Performance*, 3(2), 157–189. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(68\)90004-4](https://doi.org/10.1016/0030-5073(68)90004-4)
- Nasution, D. P. E., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Realisasi Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Efisiensi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2955>
- Pitaloka, J. J., & Handayani, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja (Studi Pada Opd Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(1), 1–20.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/4>
- Pratiwi, E. P. (2019). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Kualitas SDM, dan Pengendalian Manajerial Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(3), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2377>
- Precelina, D. D., & Wuryani, E. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(3), 1–10. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/30222>
- Rodhiyah, N. I., & Sapari. (2019). Pengaruh Sistem Informasi, Budaya, Komitmen dan Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–21.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>